

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM

Oleh : M. Fachri Adnan

ABSTRACT

The aim of this research is to find what factors did influence the success of the Unity Development Party (PPP) to increase its votes at general election of 1997 in Surakarta. It was found that there are two factors that influence the increasing of the Unity Development Party's votes at general election of 1997 in Surakarta. The first factor is leadership of Mudrich S.M. Sangidu, chairman of local organization of the party in Surakarta that called as panutan in Javanese culture context. The second factor is contemporary issues that appeared before election, that is internal conflict of Indonesian Democratic Party.

Key Words: *peningkatan suara, PPP, panutan, konflik internal.*

I. PENDAHULUAN

Perolehan suara partai politik pada pemilihan umum dipengaruhi oleh perilaku pemilih. Ada pemilih yang secara konsisten memilih partai politik tertentu pada setiap pemilu dan ada pula pemilih yang tidak konsisten, sehingga dia memilih partai yang berbeda setiap pemilu. Sikap dan perilaku pemilih tipe pertama tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai isu yang muncul menjelang pelaksanaan pemilu, sebaliknya pemilih tipe kedua rentan terhadap pengaruh isu-isu yang berkembang menjelang pelaksanaan pemilu. Bila dalam pelaksanaan pemilu banyak terdapat pemilih tipe kedua, maka perolehan suara partai akan mengalami fluktuasi yang tinggi.

Hasil pemilu tahun 1997 yang merupakan pemilu terakhir di era Orde Baru merupakan objek kajian yang menarik untuk ditelaah, karena perolehan suara partai politik pada pemilu 1997 mengalami perubahan yang mencolok dibandingkan hasil pemilu tahun 1992. Dari tiga partai politik peserta pemilu tahun 1997 secara nasional PDI mengalami penurunan suara yang sangat drastis dengan perolehan suara 3.463.225 suara (3,06 %). Golkar memperoleh peningkatan suara dengan perolehan 84.187.907 suara (74,51 %), sedangkan PPP memperoleh 25.340.028 suara (22,43 %). Sedangkan pada pemilu 1992 secara nasional PDI memperoleh 14.565.556 suara (14,90 %), Golkar memperoleh 66.599.331 suara (68,10 %), sedangkan PPP memperoleh 16.624.647 suara (17 %)(LPU, 1997).

Di Surakarta perolehan suara partai politik pada pemilu 1997 juga mengalami perubahan yang mencolok dibandingkan hasil pemilu 1992, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan hasil pemilu secara nasional. Pada pemilu 1997 PDI hanya memperoleh 8.652 suara (3,31 %), sedangkan pada pemilu 1992 PDI memperoleh 96.201 suara (36,41 %). Sebaliknya PPP memperoleh peningkatan suara yang spektakuler dari 40.370 suara (15,28 %) pada pemilu 1992 menjadi 105.952 suara (40,52 %) pada pemilu 1997. Sementara itu Golkar memperoleh peningkatan suara yang tidak begitu banyak yaitu dari 127.665 suara (48,31 %) menjadi 146.857 suara (56,17 %) pada pemilu 1997. Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 1 nampak perubahan pola dukungan pemilih yang sangat mencolok kepada partai politik peserta pemilu 1997 dibandingkan suara pemilu 1992. PPP memperoleh peningkatan 162,45 %, sedangkan Golkar hanya sebanyak 15,03 %.

Pola dukungan masyarakat Surakarta terhadap partai politik pada pemilu 1997 mengalami perubahan yang sangat berbeda dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Selama empat kali pelaksanaan pemilu selama pemerintahan Orde Baru, PPP selalu memperoleh dukungan terendah, PDI menempati posisi kedua dan Golkar menempati posisi tertinggi. Jadi pada pemilu 1997 PPP mencapai prestasi yang spektakuler dibandingkan dengan prestasinya pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Tabel 1
Perbandingan Suara Partai Politik pada Pemilu 1992 dan 1997
Untuk Pemilihan DPRD Tk.II Kotamadya Surakarta

No.	Partai Politik	Pemilu 1992		Pemilu 1997		% Naik/turun
		Suara	%	Suara	%	
1	PPP	40.370	15,28	105.953	40.52	162,45 (naik)
2	Golkar	127.665	48,31	146.857	56.17	15,03 (naik)
3	PDI	96.201	36,41	8.652	3,31	91.00 (turun)
	Jumlah	264.236	100	261.467	100	

Sumber : Kantor Sosial Politik Kotamadya Surakarta

Sehubungan dengan fenomena yang dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan penelitian ini adalah, “*Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peningkatan suara PPP pada pemilu 1997 di Surakarta ?*”

Perubahan perolehan suara partai politik pada pemilihan umum dipengaruhi oleh sikap dan perilaku pemilih. Karena itu untuk menjelaskan peningkatan suara partai politik pada pemilu 1997 di Surakarta digunakan teori perilaku pemilih (voting behavior). Dalam literatur ilmu politik ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami perilaku memilih. *Pertama*, pendekatan sosiologis yang dikenal juga dengan mazhab Colombia. Pendekatan ini menyatakan

bahwa preferensi seseorang terhadap partai politik dipengaruhi oleh latar belakang sosialnya. Dalam pendekatan ini diyakini bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, agama, umur, ras, jenis kelamin, dsb. James Brotho mengemukakan “ *Broader social characteristics remain the basic determinants of political preference*” (Gaffar, 1992). Sementara itu Lazarfel peneliti dari Universitas Colombia berpendapat “ *a person thinks politically as he is socially. Social characteristics determinane political pereference* (Gaffar, 1992). Maksudnya seseorang berpikir tentang masalah politik sesuai dengan latar belakang dan karakteristik sosialnya. Karakteristik sosial menentukan pereferensi politik.

Kedua, pendekatan psikologis yang dikenal dengan mazhab Michigan. Pendekatan ini berpendapat bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh kondisi psikologis pemilih terhadap objek pemilih tertentu. Pendukung pendekatan ini berkeyakinan bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh sikap seseorang terhadap partai politik, sikap terhadap kandidat yang dicalonkan dalam pemilihan umum atau sikap terhadap isu-isu yang berkembang sebelum pelaksanaan pemilu. Sikap terhadap partai politik yang dimaksud adalah kedekatan hubungan seseorang dengan partai politik tertentu sebagai hasil proses sosialisasi politik yang diterimanya sejak kanak-kanak sampai dewasa. Sikap terhadap kandidat merupakan hasil evaluasi seseorang terhadap kandidat yang dicalonkan dalam pemilu. Sedangkan sikap terhadap isu-isu yang muncul sebelum pelaksanaan pemilu berkaitan dengan respon partai politik menanggapi berbagai isu-isu yang muncul sebelum pelaksanaan pemilu.

Ketiga, Pendekatan rasional yang dikenal pendekatan ekonomi atau *rational choice* yang berpendapat bahwa seseorang memilih partai politik pada pemilu berdasarkan perhitungan untung rugi. Artinya pemilih akan menjatuhkan pilihan dalam pemilu kepada partai politik yang dapat mendatangkan keuntungan atau tidak merugikan kepadanya (Asfar, 1996).

Selain itu, penelitian perilaku pemilih yang dilakukan J. Kristiadi pernah menggunakan pendekatan *socio-cultural* sebagai modifikasi pendekatan sosiologis. Pendekatan ini berasumsi kondisi sosio budaya berpengaruh terhadap perilaku pemilih. Hasil penelitian J. Kristiadi di daerah Yogyakarta menyatakan bahwa perilaku pemilih dipengaruhi pola panutan. Maksudnya seseorang memilih partai politik sesuai dengan saran atau anjuran tokoh panutannya (J.Kristiadi, 1994). Hal ini disebabkan kepatuhan kepada tokoh panutan dalam budaya masyarakat Jawa sangat tinggi sehingga berpengaruh terhadap perilaku pemilih dalam pemilu. Menurut Kristiadi (1994) hal ini tidak terlepas dari rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pemilu.

Dari beberapa pendekatan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam menjelaskan fenomena perubahan suara partai politik pada pemilu 1997 di Surakarta digunakan pendekatan *psikologis* dan pendekatan

sosio- kultural. Peneliti berasumsi bahwa peningkatan suara PPP pada pemilu 1997 di Surakarta dipengaruhi oleh pola panutan yang masih kental dalam budaya masyarakat Jawa dan isu-isu komtemporer yang muncul menjelang pemilu 1997.

1. Panutan

Istilah panutan berasal dari kata “manut” (bahasa Jawa) yang berarti patuh, taat atau menurut. Dalam kamus bahasa Indonesia panutan berarti yang diikuti, diturut atau ditiru semua tidak tanduk dan sepak terjang yang baik-baik. Panutan juga berarti orang yang diteladani atau dicontoh. Menurut Koentjaraningrat “manut” adalah konsep Jawa yang penting dan salah satu sifat manusia yang terpuji. Berbagai sumber kepustakaan menyebutkan bahwa pola panutan berasal dari budaya Jawa yang paternalistik. Nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari menjelma sebagai sikap menghormati dan menempatkan orang yang dianggap senior dalam hal usia, pangkat, kedudukan serta jabatan pada posisi yang lebih tinggi dan terhormat. Pola panutan itu secara eksplisit terjadi dalam hubungan antara pimpinan dan anggota masyarakat (Kristiadi, 1994).

Dalam masyarakat Jawa sikap patuh dan taat kepada pemimpin sebagai pengejawantahan dari sikap hormat kepada orang tua sudah ditanamkan sejak masa kecil sebagaimana dikemukakan oleh Geertz tentang keluarga Jawa bahwa penanaman kepatuhan (*obedience*) dilakukan sejak usia kanak-kanak secara bertahap, sehingga anak-anak Jawa selalu digambarkan sebagai insan yang berkelakuan baik, taat dan tenang. “*Javanese children one markedly well behaved, obedience and quiet*” (Kristiadi, 1994).. Oleh karena itu sikap patuh pada pimpinan yang dianggap tokoh panutan sangat berakar dalam masyarakat Jawa.

Pola panutan itu juga berpengaruh dalam kehidupan politik. Berdasarkan hasil penelitian Kristiadi (1994) disebutkan bahwa pola panutan merupakan variabel yang cukup berperan untuk menjelaskan fenomena perilaku pemilih baik dalam masyarakat kota, dan lebih-lebih bagi masyarakat desa. Kepatuhan anggota masyarakat kepada tokoh panutan dalam hal memberikan suara pada pemilihan umum diwarnai oleh ketidakpahaman mereka mengenai arti pemilihan umum dalam konteks kehidupan politik yang luas. Kurangnya pemahaman mereka mengenai pemilu dikombinasikan dengan derajat kepatuhan masyarakat yang masih kuat kepada tokoh panutannya, mendorong mereka lebih mengandalkan tuntunan dari tokoh panutannya dalam memberikan suara mereka pada pemilihan umum.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan beberapa hal. *Pertama*, panutan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku anggota masyarakat sehingga mereka bersedia mematuhi dan mengikuti saran atau nasehat pimpinannya. *Kedua*, dalam masyarakat Jawa yang paternalistik pola panutan masih berakar dalam kehidupan masyarakat sehingga

berpengaruh dalam bidang politik khususnya dalam perilaku pemilih . *Ketiga*, besarnya pengaruh pola panutan terhadap perilaku pemilih tidak dapat dipisahkan dari rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap arti dan makna pemilihan umum.

2. Isu-isu Kontemporer

Menurut Longman Dictionary of Contemporary English (1989: 651), isu yang berasal dari kata “*issue*” berarti suatu pokok permasalahan yang akan dibicarakan, diperdebatkan atau diputuskan. Dalam penelitian ini isu dimaksudkan suatu permasalahan yang muncul sebelum pemilu, dibicarakan dan diperdebatkan dalam masyarakat.

Dalam dunia politik khususnya pada pemilu berbagai isu yang muncul dalam masyarakat dapat mempengaruhi persepsi dan sikap politik seseorang yang pada gilirannya akan menentukan perilaku politiknya. Oleh karena itu para ahli ilmu politik melihat adanya pengaruh isu-isu kontemporer yang muncul sebelum pemilu terhadap perilaku pemilih.

Adanya pengaruh isu terhadap perilaku memilih dapat dilihat dalam berbagai penelitian di negara-negara maju terutama di Amerika Serikat. Misalnya hasil penelitian Norman H. Nie, Sidney Verba dan John R. Petocit yang berjudul “The Changing American Voter” yang mengemukakan bahwa pada tahun 1960-an masyarakat Amerika lebih berorientasi kepada isu dari pada identifikasi partai (Niemi & Weisberg, 1984). Penelitian mereka tentang pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1964, 1968 dan tahun 1978 menunjukkan adanya konsistensi pengaruh isu terhadap perilaku memilih. Mereka menyimpulkan bahwa warga negara Amerika Serikat telah berfikir tentang isu secara konsisten (Huckshorn, 1984). Laporan penelitian Norman H. Nie dan kedua koleganya itu merupakan revisi terhadap hasil penelitian kelompok Michigan sebelumnya dalam “American Voters” yang menekankan besarnya peranan identifikasi partai terhadap perilaku pemilih (Niemi & Weisberg, 1984).

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh V.O. Key yang mengemukakan secara umum pemilih bertindak rasional dan bertanggungjawab. Pada pemilihan Presiden Amerika tahun 1972 faktor isu makin penting dan terlihat hubungan antara isu dengan keputusan memilih lebih kuat dari pada hubungan antara identifikasi partai dengan keputusan memilih. Isu-isu yang menonjol pada tahun 1972 ialah perang Vietnam, legalisasi *marijuana* dan demonstrasi kampus. Pemilihan Presiden Amerika tahun 1980 dianggap sebagai pemilihan yang sangat berorientasi kepada isu (*issue oriented*). Isu-isu yang menonjol pada waktu itu ialah inflasi, pengangguran, penampilan administrasi dan penyanderaan warga Amerika di Iran. Karena berbagai isu tersebut warga negara Amerika kehilangan kepercayaan terhadap Jimmy Carter dan memberi suara bagi kemenangan Ronald Reagan (Huckshorn, 1984). Jadi

sejak tahun 1970-an adanya tendensi makin besar pengaruh isu terhadap perilaku pemilih di Amerika Serikat.

Dewasa ini ada berbagai pendapat tentang pentingnya isu dalam pemilihan umum. *Pertama*, pendapat Carmines dan Stimson yang membedakan isu atas dua kategori yaitu *hard issues* dan *easy issues*. *Hard issues* hanya penting bagi pemilih yang memiliki level informasi yang tinggi, sedangkan *easy issues* akan penting bagi pemilih yang memiliki level informasi yang rendah. Mereka itu juga berpendapat bahwa *issue voting* terjadi pada umumnya bila *easy issues* terdapat dalam suatu pemilihan dan *realignment* cenderung terjadi menyangkut *easy issues* (Carmines & Stimson dalam Niemi & Weisberg), 1984). *Kedua*, pendapat Fiorina yang membedakan *issue voting* atas dua kategori yaitu, *prospective voting* dan *retrospective voting*. *Prospective voting* ialah dimana warga negara memberi suara untuk kandidat atau partai yang membuat janji akan melaksanakan kebijakan yang menguntungkan pemilih (*policy oriented*), sedangkan *retrospective voting* dimana pemilih memberikan suara berdasarkan performen atau penampilan partai dimasa lalu (*result oriented*). Menurut Fiorina adalah rasional bila pemilih tidak memberikan suara kepada partai yang tidak mempunyai penampilan yang bagus dalam pemerintahan (Fiorina, 1981).

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya dapat dikemukakan beberapa hal. *Pertama*, faktor isu dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku politik seseorang atau pemilih bila isu-isu yang muncul dalam masyarakat mereka ketahui dan pahami. Karena itu faktor isu bisa berpengaruh terhadap perilaku politik masyarakat pemilih bila mereka mempunyai akses informasi terhadap berbagai isu yang berkembang dalam masyarakat. *Kedua*, faktor isu dapat mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku masyarakat pemilih bila penyebaran isu-isu itu bersifat intensif dan dapat menjangkau masyarakat secara luas. Sebaliknya bila penyebaran isu bersifat seketika dan jangkauannya terbatas pada golongan masyarakat tertentu maka pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku masyarakat pemilih tidak begitu kentara. *Ketiga*, pengaruh isu terhadap perilaku masyarakat pemilih juga berkaitan dengan kepedulian masyarakat terhadap berbagai isu yang muncul. Karena itu menentukan pilihan berdasarkan isu menuntut tingkat pengetahuan dan kesadaran politik yang memadai.

II. METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif-eksploratif* yang bertujuan menemukan dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan suara Partai Persatuan Pembangunan pada pemilu 1997 di Kotamadya Surakarta. Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif peneliti langsung sebagai instrumen penelitian, artinya peneliti langsung sebagai pengumpul data. Menurut Dedi Oetomo (1995), pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara

diantaranya dengan observasi langsung, wawancara atau dengan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam (*deep interview*) dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan-informan kunci dan informan non-kunci.

Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumentasi partai berupa program dan kegiatan DPC PPP Surakarta, hasil-hasil pemilu dari tahun 1977 sampai tahun 1997 di Kotamadya Surakarta, peraturan pelaksanaan pemilu tahun 1997 dan liputan media massa tentang perkembangan politik nasional dan daerah sebelum pelaksanaan pemilu 1997.

Untuk menguji kredibilitas data digunakan tehnik triangulasi yaitu pengecekan keabsahan dengan metoda wawancara dari berbagai sumber atau informan penelitian. Analisis data dilakukan beberapa tahap: *Pertama*, tahap pengecekan dan reduksi data.; *Kedua*, tahap klasifikasi data; *Ketiga*, tahap interpretasi atau penafsiran data; dan *Terakhir*, tahap pengambilan kesimpulan-kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perolehan Suara PPP pada Pemilu 1997

Sebelum pelaksanaan pemilu tahun 1997 perolehan suara PPP di Kotamadya Surakarta selalu pada posisi terendah dibandingkan dengan perolehan suara Golkar dan PDI. Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 2 perolehan suara PPP di Kotamadya Surakarta sejak pelaksanaan pemilu tahun 1977 sampai pelaksanaan pemilu tahun 1992 paling tinggi hanya 40,766 suara atau 17,73 % yang diperoleh pada pemilu tahun 1982, sedangkan perolehan suara PPP terendah diperoleh pada pemilu tahun 1987 sebanyak 35,811 suara atau 14,57 %. Rata-rata perolehan suara PPP dari 4 kali pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru dari tahun 1977 sampai pemilu tahun 1992 hanya 16,18 %. Dibandingkan dengan perolehan suara Golkar dan PDI perolehan suara PPP jauh dibawah perolehan suara kedua partai tersebut. Dari empat kali pelaksanaan pemilu sebelum tahun 1997 rata-rata perolehan suara Golkar mencapai 52,07 % sedangkan PDI memperoleh rata-rata sebanyak 31,77 %. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa dukungan masyarakat Surakarta terhadap PPP pada empat kali pelaksanaan pemilu sangat rendah.

TABEL 2
Perbandingan Suara Partai Politik pada Pemilu 1977-1992
pada Pemilihan DPRD Tk.II Surakarta

No.	Partai Politik	1977		1982		1987		1992		Rata-rata
		Suara	%	Suara	%	Suara	%	Suara	%	
1	PPP	37.703	17,14	40.766	17,73	35.811	14,57	40.370	15,28	16,18
2	Golkar	96.823	50,75	126.906	55,20	132.691	53,98	127.665	48,16	52,07

3	PDI	61.263	32,11	62.215	27,07	77.11	31,45	96.201	36,44	31,77
---	-----	--------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

Sumber : Kantor Sosial Politik KOTAMADYA SURAKARTA

Tetapi pada pelaksanaan pemilu tahun 1997 perolehan suara PPP di Kotamadya Surakarta meningkat secara tajam. Pada pelaksanaan pemilu di akhir pemerintahan Orde Baru tersebut PPP memperoleh 105.953 suara (40,52 %), sedangkan pada pemilu 1992 hanya 40.370 suara (15,28 %). Ini berarti pada pemilu 1997 PPP memperoleh peningkatan suara sebanyak 162,45 % dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada pemilu 1992. Golkar pada pemilu 1997 memperoleh 146.857 suara (56,17 %), sedangkan pada pemilu 1992 partai pendukung pemerintahan Orde Baru tersebut memperoleh 127.665 suara (48,16 %). Jadi dibandingkan dengan hasil pemilu tahun 1992 peningkatan suara Golkar hanya mencapai 15,03 %, jauh lebih rendah dari peningkatan suara PPP di daerah tsb.. Sementara itu perolehan suara PDI pada pemilu 1997 hanya 8.6512 suara (3,31%), jauh lebih rendah dibandingkan perolehan suaranya pada pemilu 1992 yang mencapai 96.201 suara (36,41 %). Jadi dibandingkan kedua hasil pemilu tersebut PDI mengalami penurunan sebanyak 91.00 % (lihat tabel 1).

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perolehan Suara PPP pada Pemilu 1997

Berdasarkan analisis data penelitian dapat dikemukakan bahwa peningkatan suara PPP pada pemilu 1997 di Kotamadya Surakarta dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kepemimpinan Mudrick S.M Sangidu dan isu-isu yang berkembang sebelum pelaksanaan pemilu tahun 1997.

Pertama, Kepemimpinan Mudrick S.M.Sangidu sebagai Ketua DPC PPP Surakarta sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan suara PPP pada pemilu 1997. Sejak dipercaya memimpin DPC PPP Surakarta Mudrick tampil sebagai tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat Surakarta. Hal itu disebabkan kemampuan dan keberanian melakukan berbagai pembaharuan dan manuver politik dalam rangka merespon tuntutan dan perkembangan politik masyarakat yang menghendaki perubahan akibat hegemoni dan dominasi pemerintah atau birokrasi yang tidak sesuai aspirasi masyarakat. Untuk merespon berbagai tuntutan masyarakat tersebut Mudrick melakukan berbagai pembaharuan diantaranya mengutamakan prinsip keterbukaan dan demokrasi dalam proses pencalonan anggota legislatif, membina hubungan yang intensif antara partai dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan, melakukan berbagai manuver politik untuk menentang kebijakan pemerintah Orde Baru yang tidak benar, tidak adil dan tidak menguntungkan atau tidak sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Pola kepemimpinan yang dikembangkan Mudrick tersebut ternyata mampu merubah penampilan PPP sebelum pemilu 1997. Pada

pelaksanaan pemilu sebelumnya PPP dikenal sebagai partai yang sejuk dan akomodatif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tetapi menjelang pemilu 1997 DPC PPP Surakarta berubah menjadi partai kritis menanggapi berbagai kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keadilan dan kebenaran. DPC PPP Surakarta tidak ragu-ragu memprotes kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran dan aspirasi masyarakat. Beberapa manuver politik yang dilakukan DPC PPP Surakarta menjelang pemilu 1997 membuktikan hal itu.

Diantara manuver politik DPC PPP Surakarta sebelum pemilu 1997 adalah memboikot kegiatan DPRD Tingkat II Kotamadya Surakarta. Boikot kegiatan lembaga legislatif ini dilakukan karena isu suap yang melanda anggota komisi D DPRD Tk.II Kotamadya Surakarta. Menanggapi muncul suap ini DPC PPP Surakarta menuntut agar Pimpinan PT. Karya Abadi selaku investor pembangunan Ruko di Pasar Legi dituntut secara hukum. Tetapi karena reaksi pemerintah atau aparat penegak hukum lambat akhirnya untuk mengusut masalah tersebut maka DPC PPP Surakarta menyerukan agar anggota FPP DPRD Kotamadya Surakarta tidak mengikuti persidangan sebelum kasus tersebut diselesaikan secara hukum. Boikot kegiatan DPRD yang dilakukan DPC Surakarta tersebut berlangsung selama 6 hari dari tanggal 5 sampai 11 Maret 1996.

Manuver politik DPC PPP berikutnya adalah menolak pembangunan rumah dinas pimpinan DPRD. Pembangunan rumah dinas pimpinan DPRD tersebut direncanakan sejalan dengan pembangunan gedung DPRD dan rumah dinas Sekretaris Daerah Kotamadya Surakarta yang diperkirakan menelan biaya 3 milyar rupiah. Karena dana Pemda sangat terbatas, maka untuk merealisasikan rencana pembangunan tersebut Pemda Surakarta akan meminjam kredit ke BPD Jawa Tengah. Untuk itu Pemda Surakarta perlu meminta persetujuan DPRD Surakarta untuk mengambil kredit tersebut. Ketika itu terjadilah kontroversi antara Fraksi Persatuan Pembangunan dengan Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Demokrasi Indonesia dan Fraksi ABRI DPRD Tk.II Surakarta. Tiga fraksi yang disebutkan terakhir menyetujui rencana Pemda meminjam dana dari BPD sebanyak 3 milyar rupiah untuk pembangunan gedung DPRD, rumah dinas pimpinan DPRD dan rumah dinas Sekretaris Daerah Kotamadya Surakarta.

Sementara itu, Fraksi Persatuan Pembangunan DPRD Surakarta berdasarkan keputusan DPC PPP Surakarta memutuskan menolak rencana pembangunan rumah dinas pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah Kotamadya Surakarta. Fraksi Persatuan Pembangunan hanya menyetujui pembangunan gedung DPRD yang menelan biaya 2 milyar rupiah. Jadi FPP tidak menyetujui rencana pinjaman Pemda Surakarta sebanyak 3 milyar rupiah karena menurut mereka pinjaman tersebut akan

memberatkan masyarakat sedangkan kondisi ekonomi dalam keadaan krisis.

Kontroversi mengenai masalah tersebut makin meluas setelah bagian Litbang DPC PPP Surakarta mengadakan jajak pendapat kepada masyarakat tentang rencana pembangunan rumah dinas pimpinan DPRD Surakarta melalui pinjaman uang BPD Jawa Tengah. Bagian Litbang DPC PPP mengedarkan angket kepada berbagai unsur masyarakat seperti mahasiswa, pegawai negeri, pedagang, dan sebagainya untuk meminta pendapat mereka tentang rencana pembangunan rumah dinas tersebut. Hasil jajak pendapat menyimpulkan bahwa sebagian responden menolak rencana pembangunan rumah dinas tersebut. Hasil jajak pendapat disebarkan melalui berbagai mass media di Jawa Tengah. Menanggapi kegiatan Litbang DPC PPP Surakarta tersebut Pemda Surakarta, Pimpinan DPRD dan Ketua-ketua fraksi DPRD Surakarta selain FPP menganggap DPC PPP telah keluar dari sistem Demokrasi Pancasila karena mencampuri urusan DPRD dalam pengambilan keputusan.

Manuver politik DPC PPP Surakarta yang lain adalah menentang kuningisasi di Kotamadya Surakarta. Kuningisasi adalah program Pemda Jawa Tengah yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah yang pada waktu itu dijabat oleh Soewardi untuk memenangkan Golkar di daerahnya. Untuk itu seluruh fasilitas umum di berbagai kota di Jawa Tengah diberi cat kuning, lambang kebesaran Golkar. Program kuningisasi itu sudah dilaksanakan sejak tahun 1995 ketika persiapan memperingati 50 tahun Kemerdekaan Indonesia. Di Surakarta program kuningisasi yang melibatkan aparat Pemda setempat ditentang oleh DPC PPP Surakarta. Fasilitas umum yang dicat oleh aparat Pemda tersebut diberi cat putih oleh kader-kader PPP Surakarta dibawah pimpinan Mudrick S.M. Sangidu. Aksi kader-kader PPP Surakarta yang dilaksanakan bulan Januari 1997 dikenal dengan aksi putihisasi. Dalam aksi itu seluruh fasilitas umum di kawasan alun-alun kota Surakarta dan pagar Masjid Raya Surakarta dicat dengan warna putih sehingga menutup warna kuning yang telah ada sebelumnya.

Menurut DPC PPP Surakarta kuningisasi adalah tindakan sewenang-wenang karena tidak punya dasar hukum. Selain itu program kuningisasi melanggar peraturan pemilu, karena sudah dilakukan sebelum waktunya. Itulah sebabnya DPC PPP Surakarta berani menentangnya. Aksi putihisasi yang dilakukan DPC PPP Surakarta tersebut mendapat dukungan dari DPC-DPC PPP se-keresidenan Surakarta. Mereka menggugat Gubernur Soewardi ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena melaksanakan kebijakan yang tidak punya dasar hukum yang jelas. Manuver politik DPC PPP Surakarta menentang kuningisasi yang dilakukan Pemda Surakarta dan menggugat Gubernur Soewardi ke PTUN tentang masalah tersebut pada waktu itu dianggap tindakan yang sangat berani, karena pada masa Orde Baru tidak ada orang, partai politik atau organisasi masyarakat yang secara tegas dan terang-terangan menentang

kebijakan pemerintah. Karena keberanian Mudrick S.M. Sangidu berbuat demikian menyebabkan dia menjadi tokoh yang disegani dan dihormati masyarakat di Jawa Tengah khususnya di Surakarta, yang memang sudah bosan melihat dominasi dan hegemoni pemerintah dalam kehidupan masyarakat.

Pembaharuan dan gebrakan-gebrakan politik yang dilakukan DPC PPP Surakarta yang dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu 1997 tidak terlepas dari keberanian dari Ketua DPC PPP Surakarta yang pada waktu itu dijabat oleh Mudrick S.M.Sangidu. Pada waktu itu tidak ada pimpinan partai politik baik di pusat maupun di daerah yang berani menentang kebijakan pemerintah karena pada waktu pemerintah sangat mendominasi kehidupan politik Indonesia pada era Orde Baru. Dalam hal ini Mudrick berani berhadapan dengan kekuasaan negara atau pemerintah yang hegemonik. Karena itu kehadiran Mudrick pada waktu itu mendapat simpati masyarakat sehingga menjadikan Mudrick sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah yang totaliter.

Bukti dukungan masyarakat Surakarta terhadap kepemimpinan Mudrick S.M. Sangidu terlihat dari peningkatan suara PPP pada pemilu 1997 di Surakarta yang sangat spektakuler dimana PPP di daerah itu mencapai peningkatan sebanyak 162, 55 % dibandingkan perolehan suara pada pemilu 1992. Bila dikaitkan dengan budaya masyarakat Jawa maka kehadiran kepemimpinan Mudrick pada waktu itu dianggap sebagai tokoh panutan yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat di daerahnya. Dalam masyarakat Jawa ketaatan dan ketepatan terhadap tokoh panutan masih kental sehingga saran dan nasehat tokoh panutan diikuti dan ditaati masyarakat. Dalam kehidupan politik khususnya dalam menentukan pilihan dalam pemilu saran dan anjuran tokoh panutan masih berpengaruh terhadap sikap perilaku pemilih. Artinya pemilih memberikan pilihannya kepada partai politik sesuai dengan anjuran tokoh panutannya. Hal ini sesuai hasil penelitian J. Kristiadi yang menyatakan bahwa dalam masyarakat Jawa baik di kota maupun di pedesaan perilaku pemilih dipengaruhi oleh tokoh panutan. Kepemimpinan Mudrick sebagai tokoh panutan diyakini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan suara PPP pada pemilu 1997 di Surakarta.

Faktor *kedua*, yang mempengaruhi peningkatan suara PPP pada pemilu 1997 di Surakarta adalah faktor eksternal yaitu isu-isu yang berkembang sebelum pemilu 1997. Faktor eksternal yang dimaksud ialah isu-isu politik yang muncul sebelum pemilu 1997 yakni meluasnya konflik internal PDI. Meluasnya konflik internal PDI sebelum pemilu 1997 mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap partai banteng tersebut. Hal itu terbukti berubahnya pola dukungan masyarakat terhadap partai tersebut pada pemilu 1997 dimana perolehan suara PDI pada pemilu 1997 menurun secara drastis dibandingkan dengan perolehannya pada pemilu 1992.

Hal itu terbukti dari menurunnya perolehan suara PDI dari 96.201 suara (36,44%) pada pemilu 1992 menjadi 8.652 suara (3,31 %) pada pemilu 1997. Kenyataan itu menunjukkan berubahnya sikap dan perilaku pemilih pada masyarakat Surakarta terhadap PDI sebagai sarana penyaluran aspirasi politik mereka pada pemilu 1997. Masyarakat kurang percaya menyalurkan aspirasinya kepada PDI pada pemilu 1997.

Menurunnya kepercayaan masyarakat Surakarta terhadap PDI pada pemilu 1997 disebabkan meluasnya konflik internal PDI menjelang pemilu 1997. Konflik internal PDI menjelang pelaksanaan pemilu 1997 berawal dari munculnya kontroversi tentang penyelenggaraan Kongres PDI di Medan bulan Juni tahun 1996. Pada waktu itu DPP PDI yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Alex Letay tidak bermaksud menyelenggarakan kongres karena belum waktunya. Lagi pula kesibukan partai pada waktu itu lebih dititikberatkan untuk menghadapi persiapan pemilu 1997.

Tetapi beberapa anggota DPP PDI yang dimotori oleh Fatimah Ahmad tetap ingin menyelenggarakan kongres menjelang pemilu 1997 karena menganggap banyak persoalan partai perlu diselesaikan diantaranya karena hasil-hasil Munas PDI tahun 1993 belum dikukuhkan dalam kongres partai. Diantara dua kubu yang berbeda pendapat tersebut ternyata Fatimah Ahmad mendapat dukungan kuat dari pemerintah. Tanpa kompromi dan persetujuan dari ketua umum dan sekjen PDI pemerintah memberikan dukungan dan fasilitas terhadap penyelenggaraan kongres PDI yang dilaksanakan bulan Juni 1996. Ketua umum dan Sekjen DPP PDI menganggap kongres tidak sah karena itu Megawati dan Alex Letay sebagai ketua umum dan sekjen DPP PDI serta beberapa pengurus DPP PDI yang setia kepada Megawati tidak menghadiri kongres Medan tersebut. Akhirnya dalam kongres tersebut terpilih Soerjadi sebagai ketua umum DPP PDI dan Buttu Hutapea sebagai sekjen. Dengan demikian Megawati tersingkir dari kepemimpinan partai. Sejak itu terjadi dualisme kepemimpinan DPP PDI yaitu kepemimpinan Soerjadi yang diakui pemerintah dan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang tidak diakui pemerintah tetapi mendapat dukungan dari anggota dan simpatisan PDI dari arus bawah.

Konflik internal PDI yang menimbulkan kekecewaan warga dan simpatisan PDI direspon secara taktis oleh DPC PPP Surakarta dengan memunculkan isu Mega-bintang. Isu Mega-bintang yang merupakan fenomena bergabungnya massa PDI pendukung Megawati dalam kampanye PPP dengan menggunakan atribut Mega-bintang. Isu Mega-bintang yang digagas oleh DPC PPP Surakarta ternyata mendapat sambutan yang antusias dari massa PDI pendukung Megawati bukan hanya di Surakarta tetapi meluas ke berbagai kota di Jawa seperti Semarang, Malang, Surabaya, Jakarta. Para pendukung Megawati ikut meramaikan kampanye PPP tanpa kehilangan identitas mereka sebagai pendukung Megawati.

Meluasnya konflik internal PDI menjelang pemilu 1997 sangat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Surakarta khususnya simpatisan PDI pendukung Megawati. Partai Demokrasi Indonesia dianggap tidak dapat menyalurkan aspirasi politik mereka sehingga mereka menyalurkan aspirasi ke partai lain yaitu PPP karena partai ini dianggap mampu merespon aspirasi massa simpatisan PDI pendukung Megawati yang sangat kecewa dengan pelaksanaan dan hasil kongres PDI Medan. Jadi meluasnya konflik internal PDI yang bermuara pada munculnya isu Mega-bintang merupakan faktor kedua yang mempengaruhi peningkatan suara PPP pada pemilu 1997 di Kotamadya Surakarta.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peningkatan suara PPP pada pemilu 1997 disebabkan dua faktor. *Pertama*, faktor internal partai yaitu kepemimpinan Mudrick S.M.Sangidu yang sangat disegani dan dihormati masyarakat Surakarta. Keberaniannya menentang kebijakan pemerintah yang dianggap kurang aspiratif dan tidak adil menjadikan dia sebagai tokoh yang dihormati dan disegani masyarakat Surakarta sehingga saran dan anjurannya didengar dan diikuti oleh masyarakat.

Faktor kedua, yang mempengaruhi peningkatan suara PPP pada pemilu 1997 di Surakarta adalah konflik internal PDI yang begitu meluas menjelang pemilu 1997. Konflik internal PDI pada waktu itu tidak hanya terjadi dikalangan elit partai tetapi sudah meluas ke tingkat massa pendukung partai. Meluasnya konflik internal PDI ditambah dengan munculnya isu Mega-bintang merupakan isu-isu politik yang muncul sebelum pemilu 1997 telah berpengaruh terhadap sikap dan perilaku politik masyarakat Surakarta sehingga banyak simpatisan PDI pendukung Megawati yang menyalurkan aspirasi mereka kepada PPP pada pemilu 1997.

Adanya pengaruh Mudrick S.M.Sangidu sebagai tokoh panutan dalam masyarakat Surakarta serta pengaruh konflik internal PDI terhadap perolehan suara PPP pada pemilu 1997 di Surakarta juga tidak terlepas dari kondisi sosial politik masyarakat yang tidak simpati terhadap sikap perilaku politik pemerintah sebagai representasi sikap politik negara yang tidak adil dan tidak demokratis. Masyarakat sudah bosan dengan hegemoni dan dominasi negara, sehingga mereka lebih cenderung mendukung PPP sebagai partai non-pemerintah. Ini berarti masyarakat Surakarta memberikan perlawanan terhadap pemerintah atau negara dengan tidak mendukung kebijakan dan partai negara. Munculnya sikap perlawanan itu karena adanya kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem dan kebijakan politik pemerintah Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto yang tidak demokratis, tidak akomodatif dan aspiratif terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Muara dari kekecawaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hegemoni pemerintah dan negara adalah munculnya gerakan reformasi setelah pemilu 1997 yang dimotori oleh mahasiswa dan para intelektual kampus yang mencapai puncaknya pada tanggal 21 Mei 1998 sehingga Presiden Soeharto harus meninggalkan kursi kepresidenan yang telah 32 tahun dijabatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, Muhammad. 1996. "Beberapa Pendekatan dalam Memahami Perilaku Pemilih", dalam *Jurnal Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Chadwic A. Bruce. 1984. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial* (Edisi Indonesia). New Jersey, USA: Prentice Hall, Inc, Engliwood Cliffs.
- Conway, M. Margaret & Frank B. Feigert. 1976. *Political Analysis: An Itroudction*. Boston, USA: Allyn and Bacon, Inc.
- Fiorina, Morris P. 1981. *Retrospective Voting in American National Election*. USA: Yale Univ. Press.
- Gaffar, Affan. 1992. *The Javanese Voters: A Case Study of Election Under A Hegemonic Party System*. Yogyakarta: Gajahmada Univ. Press.
- Geert, Hildred. 1981. *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial dan Fakultas Ilmu Sosial, Univ. Indonesia.
- Huckson, Robert J. 1984. *Political Parties in America*. Monterey, California: Bvrooms Cole Publishing Company.
- Kristiadi, Joseph J. 1994. *Pemilihan Umum dan Prilaku Pemilih di Kodya Yogyakarta dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah*. Disertasi, UGM.
- Longman Group UK. Limited. 1989. *Longman Dictionary of Contemporary English*.
- LPU. 1995. *Undang-undang tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pelaksanaan Pemilu*. Jakarta: LPU
- LPU. 1995. *Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, dan Peraturan Pelaksanaannya Pemilu*. Jakarta: LPU
- Moleong, Lexy J. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Niemi, Richard & Herbert F. Weisberg. 1984. *Controversies in Voting Behaviour*. Washington DC, USA: Congressional Quaterly, Inc.

- Newman, W. Lawrence. 1997. *Social Research Methode, Qualitatif and Quantitative Approaches*. USA: Allyn & Bacon.
- Panitia Pemilihan Daerah Kotamadya Surakarta. *Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 1997, 1992, 1987, 1982 di Kotamadya Surakarta*.
- Suyanto, Bagong et.al. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Air Langga Univ. Press.